

Judul : Larangan pakai barang subsidi, SPPG gerakan ekonomi rakyat
Tanggal : Minggu, 02 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Larangan Pakai Barang Subsidi

SPPG Gerakkan Ekonomi Rakyat

ANGGOTA Komisi IX DPR Netty Prasetyani Aher mendukung kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) melarang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memakai bahan-bahan bersubsidi. Bahan-bahan yang dilarang itu adalah LPG 3 kg, beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), serta minyak goreng MinyaKita.

Menurut Netty, langkah itu tepat untuk memastikan subsidi benar-benar dinikmati masyarakat yang jadi sasaran utama. Penggunaannya tidak boleh dialihkan untuk operasional program Pemerintah agar masyarakat bisa menerima secara utuh.

Kata Netty, MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi, tapi juga jadi penggerak ekonomi lokal lewat petani, peternak, serta UMKM. "Aturan BGN mewajibkan SPPG membeli bahan sesuai Harga Acuan Penjualan (HAP) adalah untuk menjaga keseimbangan pelaksanaan program dan perlindungan produsen pangan dalam negeri," katanya, Jumat (31/7/2026).

Selanjutnya, implementasi kebijakan itu harus dibarengi tata kelola yang baik agar tidak menimbulkan kendala di lapangan. Larangan barang bersubsidi wajib diikuti pengadaan yang

jelas, kecukupan anggaran, dan pendampingan SPPG. Jangan sampai aturan ini justru mengganggu operasional dapur atau menurunkan kualitas makanan yang diterima anak-anak.

Karena itu, BGN harus memperkuat pengawasan dan transparansi pelaksanaan Program MBG dengan membuka ruang partisipasi publik. Langkah ini mencakup pengawasan penggunaan anggaran hingga pengadaan bahan pangan. "Akuntabilitas jadi kunci keberhasilan menjaga kepercayaan publik serta memastikan manfaat program tersampaikan secara optimal kepada masyarakat," katanya.

Senada, anggota Komisi IX DPR Ashabul Kahfi mendukung kebijakan BGN melarang SPPG memakai bahan-bahan bersubsidi. Dapur MBG sebaiknya tidak menggunakan produk itu karena memang tujuan utamanya adalah untuk kebutuhan serta daya beli masyarakat kurang mampu. Kebijakan ini sangat tepat untuk menjaga keadilan sosial.

Program MBG yang memiliki alokasi anggaran dari Pemerintah, kata Ashabul, tidak semestinya menyerap barang subsidi maupun komoditas stabilisasi harga. Itu untuk mencegah terjadinya subsidi ganda dalam pen-



Netty Prasetyani

anggaran. "Kebutuhan bahan pangan dan energi dapur MBG mestinya sudah dihitung masuk ke operasional SPPG," ujarnya.

Namun, kata dia, larangan itu perlu dibarengi petunjuk teknis (juknis) yang jelas bagi seluruh pihak. BGN perlu segera mengatur jenis barang dilarang, mekanisme pengawasan, masa transisi, hingga sanksi bagi SPPG melanggar. Aturan detail itu dibutuhkan supaya penerapannya berjalan seragam di setiap daerah.

Selain itu, BGN wajib memastikan kebijakan itu tidak meningkatkan biaya produksi berlebihan. Penyesuaian ini jangan sampai berujung pada penurunan kualitas maupun porsi

makanan. "Adanya perbedaan harga antarwilayah seperti Jawa, Sulawesi, Maluku, hingga Papua menuntut penetapan standar biaya yang realistis sesuai kondisi daerah masing-masing," katanya.

SPPG, sambung Ashabul, juga didorong lebih banyak menyerap bahan pangan lokal dari petani, nelayan, peternak, koperasi, serta UMKM di sekitar. Tapi, proses pengadaan bahannya kudu berjalan transparan dengan kualitas terjamin. Skema harga yang ditetapkan juga mesti berada pada tingkat yang wajar dan terjangkau.

Lebih lanjut, rencana BGN menghadirkan sistem pemantauan MBG bagi orang tua siswa juga dinilai positif untuk meningkatkan transparansi. Namun, sistem itu jangan sebatas menampilkan foto menu semata. "Informasi rincian komposisi makanan, gizi, pemicu alergi, waktu produksi, status dapur, dan kanal pengaduan harus tersedia secara lengkap," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala BGN Sudaryono menegaskan, SPPG dilarang memakai barang bersubsidi seperti LPG 3 kg, beras SPHP, dan MinyaKita. Aturan ini tidak terbatas pada tiga komoditas itu saja. Kebijakan larangan barang subsidi bertujuan

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta perputaran uang di tengah masyarakat lokal.

Tujuan pertumbuhan ekonomi itu akan kontradiktif jika MBG memakai komoditas subsidi yang diperuntukkan bagi warga karena sasaran utama MBG adalah anak-anak dan ibu hamil. "Karena itu, dapur yang nekat memakai barang bersubsidi bakal diberi peringatan, dan jika tetap membandel akan ada sanksi penutupan," jelasnya.

Sudaryono juga meminta masyarakat turut mengawasi SPPG agar tidak ada penggunaan barang bersubsidi di SPPG. Jika ada temuan pelanggaran operasional, diharapkan segera melapor agar langsung ditindak tegas. Selain itu, media massa maupun warganet yang menemukan penyimpangan di medsos juga diimbau aktif melapor.

Selain tiga bahan itu, larangan ini juga berlaku pada pengadaan bahan pangan yang wajib mengikuti HAP. Sebagai contoh, SPPG dilarang mengambil keuntungan dengan membeli telur di bawah HAP saat harga jatuh. "Kebijakan ini komitmen BGN untuk membersihkan program serta menindak tegas setiap pelanggaran," tandasnya. ■ **PYB**